

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL PADA
ANAK MELALUI MEDIA SOSIAL ONLINE**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

FERINA AYU ARDYTA

NIM. 105010107111019



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL PADA ANAK MELALUI
MEDIA SOSIAL ONLINE**

Oleh:

**FERINA AYU ARDYTA
NIM. 105010107111019**

Disetujui pada tanggal : 11 September 2014

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Ismail Navianto, SH.MH
NIP. 19550212 19850 3 1003

Alfons Zakaria, SH.LLM.
NIP. 19800629 20050 1 1002

KetuaBagian
HukumPidana

Eny Harjati, SH.M.Hum
NIP. 19590406 198601 001

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL PADA ANAK MELALUI MEDIA SOSIAL ONLINE

Ferina Ayu Ardyta, Dr. Ismail Navianto, S.H.MH.,

Alfons Zakaria, S.H.,L.LM.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

Email: dytaardyta@ymail.com

ABSTRAKSI

Manfaat teknologi informasi dan komunikasi ini selain memberikan dampak yang positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindak kejahatan-kejahatan baru (*Cyber crime*). Sasaran kejahatan baru ini (*Cyber crime*) tidak jarang menjadikan anak di bawah umur sebagai sasaran korbannya, kejahatan baru yang dapat dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ini adalah eksploitasi seksual komersial pada anak yang dilakukan dengan menggunakan media sosial online. Eksploitasi seksual komersial anak adalah sebuah pelanggaran terhadap hak anak dan mencakup praktek-praktek kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas fisik dan psikososial anak, di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur mengenai tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online yaitu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Kata Kunci: Teknologi, eksploitasi seksual, komersial, anak

ABSTRACT

The benefits of information and communication technology in addition to providing a positive impact realized also provide opportunities to be used as a means of committing new crimes (cyber crime). The target of this new crime (cyber crime) is not uncommon to make minors as victims targeted, the new evil that can be done using information and communication technology is the commercial sexual exploitation of children is done by using online social media. Commercial sexual exploitation of children is a violation of children's rights and covers criminal practices that demean and threaten the physical and psychosocial integrity of children, in the laws and regulations in Indonesia have been set regarding the crime of commercial sexual exploitation of children through online social media , namely in The Book of the Law of Criminal Law, Law No. 23 Year 2002 on Child Protection, Law No. 11 Year 2008 on Information and Electronic

Transactions, Law No. 21 Year 2007 on Combating the Crime of Trafficking in Persons, Law No. 44 2008 on Pornography .

Keywords : Technology, sexual exploitation, commercial, children

I. Pendahuluan

Pada zaman era globalisasi saat ini telah banyak sekali menunjukan kemajuan dalam segala bidang salah satunya kemajuan teknologi dan komunikasi, peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.

Teknologi informasi dan komunikasi telah di dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat saat ini, manfaat teknologi informasi dan komunikasi ini selain memberikan dampak yang positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindak kejahatan-kejahatan baru (Cyber crime). Sasaran kejahatan baru ini (Cyber crime) tidak jarang menjadikan anak di bawah umur sebagai sasaran korbannya

Bentuk kejahatan (cyber crime) karena perkembangan teknologi komunikasi memiliki dampak negatif yang sangat memprihatinkan bagi anak baik bagi mentalnya hingga ke kehidupan sosialnya. salah satunya penyalahgunaan kegunaan internet melalui jejaring sosial atau media sosial online oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang melibatkan anak di bawah umur sebagai korban kekerasan, pelecehan dan pengeksploitasian seksual akibat dari kejahatan seksual. Kejahatan seksual ini disebut dengan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA). Deklarasi dan Agenda Aksi untuk Menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) merupakan instrumen yang pertama-tama mendefinisikan eksploitasi seksual komersial anak sebagai :

“Sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual dan sebagai objek komersial. Eksploitasi seksual komersial anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern seksual yang nyata”.

Terkait dengan tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online ada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak di antaranya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di paparkan di atas maka merasa perlu dilakukan sebuah penelitian dan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana eksploitasi seksual komersial pada anak di bawah umur melalui media sosial online yang telah meresahkan banyak kalangan beserta sanksi-sanksi yang telah ditetapkan oleh ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dalam hal dasar hukum yang memiliki kaitan erat pada pokok permasalahan ini adalah KUHP pasal 296 dan 506.

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

III. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian normatif adalah suatu penelitian yang mempergunakan sumber data sekunder. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian, penelitian hukum normatif yang mempergunakan sumber data sekunder.¹

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah pendekatan perundang-undangan atau (*statute approach*), pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.² Di samping itu dilakukan pula upaya untuk mengkaji dan menguji bahan hukum dengan menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu pendapat para ahli hukum dan data sekunder bahan hukum tersier yaitu berasal dari internet.

Bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, serta bahan hukum sekunder dan tersier.

¹ Dyah Ochtorina, A'an Efendi, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hal 20

² Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal.93

Teknik untuk memperoleh bahan hukum pada penelitian ini adalah dengan cara melakukan *library research* (studi kepustakaan) dan akses internet. Kemudian analisis bahan hukum, teknik analisis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis interpretasi, yaitu dengan penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum.³ Metode penafsiran yang digunakan dalam penelitian ilmu hukum normatif terdapat dua metode. Pertama, penafsiran gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa dan kata-kata yang merupakan alat bagi pembuat undang-undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya. Kedua, penafsiran sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan, sehingga dapat mengerti maksudnya.

Kemudian dalam penelitian ini selain metode interpretasi, teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah *content analysis*. *Content analysis* (analisis isi) menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna signifikan dan relevasinya.⁴

1. Definisi Konseptual

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka

³ Johan, Bahder Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal 93

⁴ Ibid, hal.93

dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

2. Eksploitasi Seksual Komersial

Eksploitasi seksual komersial adalah bentuk paksaan dan/atau tanpa paksaan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak yang di jadikan sebagai subjek eksploitasi dan kekerasan seksual.

3. Anak

Anak dalam penelitian ini adalah menurut pasal 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun , termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4. Media sosial online

Kemunculan situs media sosial online atau dalam bahasa Inggris Social Network diawali dari adanya inisiatif untuk menghubungkan orang-orang dari seluruh belahan dunia. Harapannya agar mereka tetap saling dapat berhubungan dengan keluarga, sahabat, menemukan kawan lama atau hanya sekedar bincang-bincang. Media sosial online atau disebut pula jejaring sosial adalah struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi. Jejaring ini menunjukkan jalan dimana mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga. Istilah ini diperkenalkan oleh profesor J.A. Barnes di tahun 1954.

IV. Hasil dan Pembahasan

A. Pengaturan Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Pada Anak Melalui Media Sosial Online Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

1. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tindak pidana membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkannya dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan

orang ketiga sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan di atur di dalam pasal 296 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga sebagai mata pencarian atau sebagai kebiasaa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan (4) empat bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah)”.

Di dalam pasal 506 KUHP diatur mengenai tindak pidana sebagai germo atau mucikari yang mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh seorang perempuan atau laki-laki, yang berbunyi:

“Barangsiapa sebagai germo mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan oleh seorang perempuan atau laki-laki, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun”.

2. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak dalam pasal 59 dan pasal 88 yang berbunyi:

Pasal 59

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Pasal 88

“Setiap orang yang mengeksplorasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

3. Larangan mengenai eksploitasi seksual diatur dalam Undang-undang No.21 Tahun 2008 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 2 ayat (1) dan (2).Pasal 1 ayat (8): “Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”.

Pasal 2 ayat (1):“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Pasal 2 ayat (2):“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

4. Dalam Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ada beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online yaitu pasal 27 ayat (1), pasal 45 ayat (1) dan pasal 52 ayat (1) jo 27 ayat (1).

Pasal 27 ayat (1): “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Pasal 45 ayat (1): “setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2). Ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 52 ayat (1) jo 27 ayat (1): “dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok”.

5. Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi diatur dalam Pasal 30 juncto Pasal 4 ayat (2),:

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008:

“(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. Alat Kelamin atau Pornografi anak”.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008:

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

B. Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Pada Anak Melalui Media Sosial Online Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

tentang pengaturan tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial, terdapat perbedaan terkait perbuatan tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak, antara lain:

- a. Dalam KUHP terdapat pasal 296 dan 506 yang mengatur ketentuan mengenai perbuatan, yaitu:

1. perbuatan yang memperlancar, memudahkan, perbuatan cabul orang lain
2. menurut pasal 296 dan 506 menjadikannya sebagai kebiasaan dan mata pencaharian dan/atau sumber penghasilan adalah unsur esensial kejahatan, yang artinya kejahatan tidak mungkin terjadi tanpa adanya unsur ini.⁵
3. Objek dalam pasal ini boleh seorang dewasa atau seorang yang belum dewasa.

Kata menjadikan kebiasaan dan mata pencaharian berarti perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus dilakukan lebih dari satu kali.

- b. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 88 juncto mengatur ketentuan mengenai perbuatan yaitu:
 1. Perbuatan mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak
 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
 3. Objek korban yang perbuatannya mengeksploitasi ekonomi atau seksual adalah anak atau seorang yang belum dewasa.⁶

Dalam pasal ini tidak ada penjelasan mengenai bentuk-bentuk perbuatan eksploitasi seksual dan ekonomi pada anak.

- c. Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada pasal 2 ayat (1) mengatur ketentuan mengenai perbuatan yaitu:
 1. melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
 2. dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,

⁵ Adami Chazawi, op.cit, hal. 114

⁶ Burhan Bungin, **Pornomedia Konstruksi Sosial Teknologi Telematika Perayaan Seks di Media Massa**, Prenada Media, Jakarta Timur, hal. 129

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain

3. untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut.
4. Objek korban dari perbuatan dalam pasal ini bisa seorang dewasa atau seorang yang belum dewasa.

d. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 27 ayat (1) mengatur ketentuan mengenai perbuatan yaitu:

1. tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Perbuatan yang dilakukan dalam pasal ini menggunakan media komunikasi elektronik berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Dalam objeknya menurut pasal 1 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, kode akses, simbol. Terkait dengan muatan yang melanggar kesusilaan dalam tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial ini adalah pornografi anak dan prostitusi *cyber* anak.

e. Dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada pasal 30 juncto pasal 4 ayat (2) mengatur ketentuan mengenai perbuatan tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak yaitu:

1. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan dan tampilan yang mengesankan ketelanjangan
2. secara menyajikan eksplisit alat kelamin
3. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual
4. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung.

Perbuatan yang dilakukan dalam pasal ini menggunakan media komunikasi termasuk media sosial online

Tabel 1

Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Pada Anak Melalui Media Sosial Online KUHP, UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

| No. | Keterangan | KUHP | UU No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak | UU No.11 tahun 2008 Tentang ITE | UU No.21 tahun 2007 Tentang PTPPO | UU No.44 tahun 2008 Tentang Pornografi |
|-----|------------|--|---|--|--|--|
| | Pasal | 296 dan 506 | 88 | 2 ayat (1) | 45 ayat (1) juncto 27 ayat (1) | 30 juncto pasal 4 ayat (2) |
| 1 | Perbuatan | Dalam Pasal 296: 1. menyebabkan atau memudahkan 2. perbuatan cabul 3. sebagai pencaharian atau kebiasaan. Pasal 506: 1. perbuatan yang mempelancar, memudahkan, | Pasal 88 mengatur ketentuan mengenai perbuatan berupa: 1. Mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak 2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain | Pasal 2 ayat (1) mengatur ketentuan mengenai perbuatan berupa : 1. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang. 2. Dengan kekerasan 3. Tujuan mengeksploitasi | Pasal 45 ayat (1) juncto pasal 27 ayat (1) mengatur ketentuan mengenai perbuatan berupa : 1. tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya sebuah informasi dan/atau dokumen yang bersifat elektronik | Pasal 30 juncto pasal 4 ayat (2) mengatur ketentuan mengenai perbuatan berupa: 1. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan dan tampilan yang mengesankan ketelanjangan 2. Menyajikan secara |

| | | | | | | |
|---|---------------------------|--|---|---|---|---|
| | | <p>perbuatan cabul orang lain</p> <p>2. Menarik keuntungan</p> <p>3. Menjadikannya sebagai kebiasaan dan mata pencaharian atau sumber penghasilan</p> <p>4. Kata menjadikan kebiasaan dan mata pencaharian disini berarti perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau dilakukan lebih dari satu kali</p> | | orang tersebut. | <p>2. Informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut mengandung unsur pelanggaran terhadap kesusilaan</p> | <p>eksplisit alat kelamin</p> <p>3. Mengeksplotasi atau memamerkan aktivitas seksual</p> <p>4. Menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.</p> |
| 2 | Unsur-unsur tindak pidana | <p>Pasal 295 ayat (1) angka 2, ayat (2):</p> <p>1. dengan sengaja</p> <p>2. menghubungkan atau memudahkan</p> <p>3. sebagai mata pecaharian atau kebiasaan.</p> <p>Pasal 506:</p> <p>1. Perbuatan dengan sengaja</p> <p>2. Menjadikannya sebagai kebiasaan</p> | <p>1. Setiap orang baik perempuan maupun laki-laki dalam keadaan jiwa yang sehat</p> <p>2. Mengeksplotasi anak secara ekonomi atau seksual</p> <p>3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain</p> | <p>1. Setiap orang dalam keadaan jiwa yang sehat</p> <p>2. Melakukan perkrutan, pengangkutan, penampungan Pengiriman, pemindahan, Penerimaan</p> <p>3. Dengan kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, Pemalsuan, penyalahgunaan Kekuasaan</p> <p>4. Untuk tujuan eksploitasi atau tereksplotasinya orang</p> | <p>1. Perbuatan tanpa hak</p> <p>2. Dengan sengaja dan sadar</p> <p>3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya sebuah informasi dan/atau dokumen yang bersifat elektronik yang mengandung unsur pelanggaran terhadap kesusilaan</p> | <p>1 Perbuatan menyediakan, menawarkan, mengiklankan, mengeksplotasi, memamerkan aktivitas, daya tarik tubuh tertentu, jasa layanan atau hubungan seksual</p> <p>2. Menggunakan media tertentu.</p> |

| | | | | | | |
|---|--------|---|--|---|--|---|
| 3 | Sanksi | <p>Pasal 296:</p> <p>1. Pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan</p> <p>Pasal 506:</p> <p>1. Pidana penjara 1 (satu) tahun</p> | <p>1. Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun</p> <p>2. Pidana denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> | <p>1. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun</p> <p>2. Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun</p> <p>3. Pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta)</p> <p>4. Pidana denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)</p> | <p>Pasal 45 ayat (1) juncto pasal 27 ayat (1)</p> <p>1. Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun</p> <p>2. pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)</p> <p>Pasal 52 ayat (1) juncto pasal 27 ayat (1)</p> <p>1. Pemberatan ditambah sepertiga dari pidana pokok</p> | <p>1. Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan</p> <p>2. Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun</p> <p>3. Pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)</p> <p>4. Pidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)</p> <p>5. penambahan sepertiga dari maksimum ancaman pidana pokok</p> |
|---|--------|---|--|---|--|---|

Sumber : *Bahan Hukum Primer, Diolah, 2014*

C. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Pada Anak Melalui Media Sosial Online Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang lebih sering dikenal sebagai asas “*geen straf zonder schuld*” (tiada pidana tanpa kesalahan). Tetapi, apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana maka disebut dengan *leer van het materiele feit*. Sedangkan dalam KUH Pidana sendiri tidak memberikan sebuah penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “*geen straf zonder schuld*”, akan tetapi asas ini dapat dikatakan sebagai asas yang tidak tertulis dan berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yakni tindak pidana (*daad strafrecht*), pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*).⁷

Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online, diantaranya:

1. menurut KUHP, Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak yang dilakukan oleh mucikari atau germo di rumuskan dalam pasal 296 dan 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu:

Menurut pasal 296 KUHP:

“Barangsiapa membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga sebagai mata pencarian atau sebagai kebiasaan, dipidana dengan pidana penjara

⁷ Roni Wiyanto, **Asas-asas Hukum Pidana Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal 96.

selama-lamanya 1 (satu) tahun dan (4) empat bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah)”.

Menurut pasal 506 KUHP:

“Barangsiapa sebagai germo mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan oleh seorang perempuan atau laki-laki, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun”.

2. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak yang dilakukan oleh mucikari atau germo melalui media sosial online dirumuskan dalam pasal 88 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu:

Menurut pasal 88 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

3. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak yang dilakukan melalui media sosial online dirumuskan ke dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu :

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.21 Tahun 2007

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

4. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak yang dilakukan melalui media sosial online di rumuskan ke dalam pasal 45 ayat (1) juncto pasal 27 ayat (1) Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

Menurut pasal 45 ayat (1) juncto pasal 27 ayat (1) Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

5. Menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak yang dilakukan melalui media sosial online di rumuskan ke dalam pasal 30 jo pasal 4 ayat (2) Undang-undang No.44 Tahun 2008 Tentang pornografi, yaitu:

Menurut pasal 30 jo pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi sebagai berikut:

“ Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus

lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

D. Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Pada Anak Melalui Media Sosial Online Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Tentang pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online, terdapat perbedaan yaitu:

- a. Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online dalam pasal 296 dan 506 KUHP:
 1. telah menyebutkan unsur kesalahan dengan sengaja
 2. menjadikannya sebagai mata pencaharian dan kebiasaan, dimaksudkan bahwa yang bersangkutan menerima bayaran.⁸
 3. ancaman pidana atau sanksi pidana kepada pelaku yaitu pada pasal 296 ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda paling banyak seribu rupiah dan dalam pasal 506 ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Dalam pasal 296 dan 506 KUHP hanya mencantumkan pidana penjara maksimal serta denda maksimal. Pasal 296 dan 506 KUHP tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online, maka pelaku tidak dapat dijerat dengan pasal 296 atau 506 KUHP.
- b. Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online dalam pasal 88 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

⁸ Leden Marpaung, **Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revisinya**, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hal. 72

1. tidak menyebutkan unsur kesalahan seperti dengan sengaja atau tanpa hak.
 2. ancaman pidana atau sanksi pidana kepada pelaku dalam pasal 88 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dinyatakan secara tegas dan jelas yaitu ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dalam pasal 88 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak hanya mencantumkan ancaman pidana penjara maksimal dan denda maksimal. Pasal ini sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak, tetapi untuk memenuhi unsur tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online masih belum tepat.
- c. Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:
1. tidak menyebutkan unsur kesalahan berupa kesengajaan atau tanpa hak melawan hukum
 2. ancaman pidana atau sanksi pidana kepada pelaku yaitu ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah mencantumkan ancaman pidana penjara minimal dan maksimal dan pidana denda minimal dan maksimal.⁹ Tetapi dalam pasal ini masih belum memenuhi unsur-unsur tindak

⁹Alfitra, op.cit, hal.161

pidana eksploitasi seksual pada anak melalui media sosial online dan pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online ini tidak dapat dikenakan pasal ini apabila dalam perbuatannya telah mendapatkan persetujuan dari pihak korbannya sendiri yaitu anak untuk ikut dalam kegiatan tindak pidana eksploitasi seksual komersial yang dikukan menggunakan media sosial online.

d. Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online dalam pasal 45 ayat (1) juncto 27 ayat (1) Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

1. telah menyebutkan unsur kesalahan
2. dilakukan dengan sengaja dan dilakukan dalam keadaan jiwa yang sehat
3. ancaman pidana atau sanksi pidana kepada pelaku yaitu ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), lalu berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online dalam pasal 52 ayat (1) juncto 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual komersial pada anak dikenakan sepertiga dari pidana pokok. Dalam pasal 45 ayat (1) juncto 27 ayat (1) dan pasal 52 ayat (1) juncto 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mencantumkan ancaman pidana penjara maksimal dan pidana denda maksimal serta ditambah dengan sepertiga dari pidana pokok. Pasal ini telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online.

e. Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online dalam pasal 30 juncto pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi:

1. tidak menyebutkan unsur kesalahan berupa dengan sengaja dan tanpa hak
2. ancaman pidana atau sanksi pidana kepada pelaku yaitu ancaman pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Ditambah dengan sepertiga ancaman pidana maksimum bagi pelaku yang melibatkan anak diatur di dalam pasal 37 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Dalam pasal 30 juncto pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah mencantumkan ancaman pidana penjara minimal dan maksimal serta ancaman pidana denda minimal dan maksimal.

Tabel 2

Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Pada Anak Melalui Media Sosial Online KUHP, UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

| No | Keterangan | KUHP | UU No.23 tahun 2003 tentang Perlindungan anak | UU No.21 tahun 2007 tentang PTPPO | UU No.11 tahun 2008 tentang ITE | UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi |
|----|----------------|--|--|--|---|---|
| | Pasal | 296 dan 506 | 88 | 2 ayat (1) | 45 ayat (1) juncto pasal 27 ayat (1) | 30 juncto pasal 4 ayat (2) |
| 1 | Unsur obyektif | Pasal 296. unsur tindak pidana sebagai syarat agar dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya, yaitu: 1. barangsiapa 2. menyebabkan atau memudahkan 3. perbuatan cabul 4. dengan orang ketiga Pasal 506: 1. pelaku dalam keadaan jiwa yang sehat 2. adanya usaha memudahkan, | Pasal 88, unsur tindak pidana sebagai syarat agar dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya yaitu: 1.setiap orang baik perempuan maupun laki-laki dalam keadaan jiwa yang sehat 2.mengeksploitasi Anak secara ekonomi atau seksual 3.dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain | Pasal 2 ayat (1), unsur tindak pidana sebagai syarat agar dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya yaitu: 1.setiap orang dalam keadaan jiwa yang sehat 2. melakukan perekrutan,pengangkutan,p enampungan,pengiriman,p emindahan,penerimaan 3 .dengan kekerasan,penipuan,pencu likan 4. untuk tujuan eksploitasi atau tereksplotasinya seseorang | Pasal 27 ayat (1) juncto pasal 45 ayat (1), unsur tindak pidana sebagai syarat agar dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya yaitu: 1. setiap orang dalam keadaan jiwa yang sehat 2. tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 3.informasi dan/atau dokumen yang bersifat elektronik yang mengandung unsur pelanggaran kesusilaan | Pasal 30 juncto pasal 4 ayat (2), unsur tindak pidana sebagai syarat agar dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya, yaitu: 1. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan dan tampilam yang menunjukkan ketelanjangan 2. menyajikan secara eksplisit alat kelamin 3.mengeksploitasi atau memamerkan aktifitas seksual |

| | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|---|---|--|
| | | memperlancar orang lain untuk berbuat cabul | | | . | 4. menawarkan atau mengiklankan baik secara langsung maupun tidak langsung layanan seksual. |
| 2 | Unsur subyektif | KUHP merumuskan yang menjadi kesalahan dari pasal 296 adalah : 1. kesalahan berupa dengan sengaja 2. menjadikannya mata pencaharian dan kebiasaan | UU Perlindungan Anak merumuskan yang menjadi kesalahan dari pasal 88 adalah : 1. kesalahan berupa dengan sengaja 2. mengeksploitasi anak secara seksual atau ekonomi | UU PTPPO merumuskan yang menjadi kesalahan dari pasal 2 ayat (1) adalah : 1. kesalahan berupa dengan sengaja | UU ITE merumuskan yang menjadi kesalahan dari pasal 27 ayat (1) juncto pasal 45 ayat (1) adalah : 1. dilakukan dengan sengaja, sadar akan adanya aturan yang melarangnya | UU Pornografi merumuskan yang menjadi kesalahan dari pasal 30 juncto pasal 4 ayat (2) adalah : 1. dalam pasal ini tidak disebutkan unsur kesalahan berupa menyediakan 2. perbuatan yang dilakukan dalam keadaan jiwa yang sehat. |

| | | | | | | |
|---|--------|--|--|---|--|---|
| 3 | sanksi | <p>Pasal 295 ayat (1) angka 2:</p> <p>1. pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan</p> <p>Pasal 506:</p> <p>1. pidana penjara 1 (satu) tahun</p> | <p>1. pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun</p> <p>2. pidana denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> | <p>1. pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun</p> <p>2. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun</p> <p>3. pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta)</p> <p>4. pidana denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)</p> | <p>pasal 45 ayat (1) juncto pasal 27 ayat (1)</p> <p>1. pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun</p> <p>2. pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)</p> <p>Pasal 52 ayat (1) juncto pasal 27 ayat (1)</p> <p>1. pemberatan ditambah sepertiga dari pidana pokok</p> | <p>1. pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan</p> <p>2. pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun</p> <p>3. pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)</p> <p>4. pidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)</p> <p>5. ditambah sepertiga dari pidana maksimum bagi setiap orang yang melibatkan anak sebagai objek.</p> |
|---|--------|--|--|---|--|---|

Sumber : *Bahan Hukum Primer, Diolah, 2014*

V. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan mengenai tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah:
 - a. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu pada pasal 296 dan 506 hanya mengatur mengenai tindak pidana secara umum, karena transaksi seksual yang diatur dalam pasal 296 dan 506 tidak mengatur mengenai transaksi yang menggunakan media teknologi internet
 - b. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu pada pasal 88 juncto pasal 59 telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak tetapi hanya mengatur mengenai tindak pidana eksploitasi seksual pada anak secara umum yang lebih ditujukan kepada pemerintah dan negara.
 - c. Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu pada pasal 2 ayat (1) hanya mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi , pasal ini belum memenuhi unsur-unsur tindak pidana eksploitaasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online.
 - d. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pada pasal 27 ayat (1) telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana eksploitasi seksual komersial

pada anak melalui media sosial online karena dalam pasal 27 ayat (1) ini mengatur tentang tindak pidana kesusilaan khusus yang dilakukan menggunakan media internet yaitu media sosial online.

- e. Dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yaitu pada pasal 30 juncto pasal 4 ayat (2) telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online. Dalam ketentuan pasal 30 juncto pasal 4 ayat (2) telah mengatur secara keseluruhan mengenai tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak

2. Pertanggungjawaban pidana tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah:

- a. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu pada pasal 596 dan 506 pembebanan pertanggungjawaban pidana pada pasal ini dapat dikenakan kepada pelaku tetapi masih kurang tepat karena masih adanya beberapa unsur-unsur tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online yang belum terpenuhi.
- b. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu pada pasal 88 Juncto pasal 59 pembebanan pertanggungjawaban pidana pada pasal ini dapat dikenakan kepada pelaku t telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana eksploitasi seksual komersial tetapi masih kurang tepat karena hanya mengatur mengenai tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak secara umum.
- c. Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu pada pasal 2 mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan kepada pelaku jika dalam perbuatannya ada kesepakatan antara pelaku dan korban

- d. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pada pasal 27 ayat (1) pembebanan pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada pelaku karena beberapa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online tetapi masih kurang tepat karena unsur pidana yang menjadi syarat masih ada yang belum terpenuhi.
- e. Dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yaitu pada pasal 30 juncto pasal 4 ayat (2) mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidana pada pasal ini dapat dikenakan kepada pelaku karena unsur-unsur tindak pidana yang melekat pada tindak pidana eksploitasi seksual komersial telah diatur secara keseluruhan dalam pasal ini.

B. Saran

- 1. Pengaturan mengenai tindak pidana eksploitasi seksual pada anak seharusnya diperjelas kembali dengan menyebutkan bentuk-bentuk eksploitasi seksual pada anak, sehingga dapat membantu para aparat hukum dalam melaksanakan tugasnya untuk memberantas tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak.
- 2. Perlu adanya sanksi pidana bagi para pengguna jasa seks anak, karena dari semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak belum ada yang mengkriminalisasikan pengguna jasa seks anak. Sebab dalam eksploitasi seksual komersial pada anak para pengguna jasa seks anak termasuk kedalam pelaku.
- 3. Kejahatan eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online tersebut merupakan kejahatan berbasis teknologi internet, untuk itu maka diperlukanlah aparat-aparat pelaksana yang juga memiliki keahlian di bidang teknologi informatika dengan didukung sarana-sarana yang canggih pula, agar dapat melacak

penjahat dan siapa saja yang terlibat dalam tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.Fuad Usfa, **Pengantar Hukum Pidana**, UPT. Penerbitan Muhammadiyah Malang, 2006.
- Abdul Wahid, Mohammad Labib, **Kejahatan Mayantara(Cyber Crime)**, PT.Refika Aditama, Bandung,
- Adami Chazawi, **Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana**, PT. Kaja Grafinda Persada, Jakarta, 2011.
- Adami Chazawi, **Tindak Pidana Pornografi**, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.
- Adami Chazawi, Ardi Ferdian, **Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik**, Bayumedia Publishing, Cetakan Pertama, Malang, 2011.
- Alam , **Pelacuran dan Pemerasan studi sosiologis tentang eksploitasi manusia oleh manusia** , Alumni , Bandung ,1984.
- Alfitra, **Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP Korupsi, Money Laundering, dan trafficking**, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Jakarta, 2014.
- Arif Gosita, **Masalah Perlindungan Anak**, Akademindo Pressindo, Jakarta, 1989.
- Burhan Bungin, **Pornomedia Konstruksi Sosial Teknologi Telematika Perayaan Seks di Media Massa**, Prenada Media, Jakarta Timur
- Dewi Bunga, **Prostitusi Cyber**, Udayana Universitas Press, Denpasar-Bali, 2012.
- Dyah Ochtorina, A'an Efendi, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- ECPAT, **Memperkuat Hukum Penanganan Eksploitasi Seksual Anak Panduan Praktis**, Medan, Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ECPAT Affiliate Member Group in Indonesia), 2010.
- Edi Yunara, **Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Ermansjah Djaja, **KUHP Khusus Kompleksi Ketentuan Pidana Dalam Undang-undang Pidana Khusus**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Kartonegoro, **Diktat Kuliah Hukum Pidana**, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Leden Marpaung, **Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revisinya**, Sinar Grafika Offset, Jakarta
- Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia**, PT.Refika Aditama, Bandung,2008.
- Mahrus Ali, Bayu Aji Pramono, **Perdagangan Orang Dimensi , Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia** ,PT Citra Aditya Bakti.Bandung 2011.

- Muladi dan Dwidja Priyatno, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, PT Asdi Mahasatya. Jakarta 2008.
- Moeljatno, **Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Rachmad Budiono, **Hukum Pekerja Anak**, Universitas Negeri Malang, Malang, 2008.
- Roni Wiyanto, **Asas-asas Hukum Pidana Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, **Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan**, Cetakan Kedua Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Rika Saraswati, **Hukum Perlindungan Anak**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Sisawanto Sunarso, **Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: studi kasus Prita Mulyasari**, PT Rineka Cipta Jakarta, 2009, hal 39.
- Soerjano Soekanto, Sri Mmudji, **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal 13-1
- Soerjano Soekanto, Sri Mmudji, **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2007
- Syawal Abdulajid, Anshar, Husni Tamrin, **Pertanggungjawaban Pidana Komando Militir Pada Pelanggaran Berat HAM: Suatu Kajian Dalam Teori Pembaruan Pidana**, Laksbang Pressindo Yogyakarta dan Lembaga Penerbitan Universitas Khairun, Ternate, Maluku Utara, 2011
- V. Christianto, **Pengantar Manajemen Proyek Berbasis Internet**, Elex Media Komputindo, Jakarta.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

INTERNET

- Ahmad Rosyadi, **KAJIAN YURIDIS TERHADAP PROSTITUSI ONLINE DI INDONESIA**, Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/2288>
- Davit Setyawan, 2014, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Perkosaan Dalam Pemberitaan Media Massa** (*online*), <http://www.kpai.go.id/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa>
- Dicky Sidik Permana, **Tinjauan Yuridis Tentang Pekerja Seks Komersial (PSK) Anak di Kabupaten Indramayu dihubungkan dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, Tesis, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Langlang Buana, <http://repository.fhunla.ac.id>
- Realizhar Adillah Kharisma Ramadhan, **Efektifitas Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa)**, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makassar 2013, hal.46, <http://repository.unhas.ac.id/>